



FAJAR DI BUMI TADULAKO

Jejak Perlawanan dan Warisan
Kepahlawanan Sulawesi Tengah



Kata Pengantar

Buku ini disusun sebagai sebuah ikhtiar historiografis untuk mengabadikan memori kolektif bangsa terhadap heroisme putra-putri terbaik Sulawesi Tengah. Melalui rangkuman dokumentasi 25 sosok pejuang ini, kita melakukan retrospeksi terhadap narasi besar perlawanan Nusantara yang sering kali terfragmentasi dalam catatan sejarah arus utama. Tujuan utama karya ini adalah untuk memberikan penghormatan khidmat sekaligus menjadi rujukan edukatif bagi generasi masa kini mengenai harga sebuah kedaulatan.

Di dalam lembaran-lembaran ini, tersimpan jejak pengorbanan yang dilakukan di bawah panji semangat *Tadulako*. Setiap potret visual yang tersaji bukan sekadar arsip, melainkan representasi dari keteguhan hati manusia-manusia yang memilih berdiri di garis depan demi membebaskan tanah leluhur dari belenggu kolonialisme. Semoga tulisan ini menjadi api yang terus menyala dalam sanubari rakyat Sulawesi Tengah.

Palu, Februari 2026

Anugerah Perdana Singi

Prakata Penulis

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku *Fajar di Bumi Tadulako: Jejak Perlawanan dan Warisan Kepahlawanan Sulawesi Tengah* ini dapat diselesaikan. Buku ini lahir dari kegelisahan akademik sekaligus tanggung jawab moral untuk menghadirkan kembali narasi perjuangan tokoh-tokoh Sulawesi Tengah dalam konteks sejarah nasional Indonesia.

Selama ini, historiografi Indonesia cenderung berpusat pada wilayah-wilayah yang menjadi episentrum administrasi kolonial. Padahal, denyut perjuangan kemerdekaan juga bergetar kuat di daerah-daerah yang secara geografis jauh dari pusat kekuasaan, termasuk di Sulawesi Tengah. Wilayah ini menyimpan jejak resistensi yang panjang, baik dalam bentuk perlawanan terhadap kebijakan kolonial, gerakan sosial-keagamaan, maupun kontribusi dalam mempertahankan Republik Indonesia pada masa revolusi dan pascakemerdekaan.

Buku ini berupaya memetakan 25 tokoh pejuang berdasarkan wilayah operasional dan periode perjuangan mereka, sekaligus menyajikan refleksi nilai kepahlawanan yang relevan bagi generasi masa kini. Penulisan dilakukan dengan pendekatan historis-kritis melalui kajian literatur, penelusuran arsip, serta pembacaan kontekstual terhadap dinamika sosial-politik Sulawesi Tengah dari akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20.

Penulis menyadari bahwa kerja historiografi adalah proses yang tidak pernah selesai. Beberapa data masih memerlukan verifikasi lanjutan melalui penelitian arsip kolonial, dokumen administratif lokal, serta penguatan kajian sejarah lisan. Oleh karena itu, buku ini tidak

dimaksudkan sebagai narasi final, melainkan sebagai kontribusi awal yang terbuka terhadap dialog akademik dan pengembangan studi sejarah lokal.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada para tokoh masyarakat, keluarga para pejuang, akademisi, arsiparis, budayawan, dan semua pihak yang telah membantu menyediakan informasi, dokumentasi, serta dukungan moral dalam penyusunan buku ini. Semoga karya ini dapat menjadi referensi bagi dunia pendidikan, penelitian sejarah, serta penguatan identitas dan karakter generasi muda Sulawesi Tengah.

Akhirnya, semoga semangat perjuangan para pendahulu tetap menyala dalam kesadaran kolektif kita. Sejarah bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan fondasi moral untuk membangun masa depan.

Palu, Februari 2026

Anugerah Perdana Singi

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Prakata Penulis	1
Daftar Isi.....	3
Bab I Pendahuluan.....	5
Sejarah Perlawanan di Sulawesi Tengah	5
Bab II Klasifikasi Wilayah dan Periode Perjuangan	10
Pejuang asal Sulawesi Tengah.....	10
Bab III Refleksi dan Nilai Kepahlawanan.....	31
Sintesis Nilai Perjuangan.....	31
Bab IV Warisan, Pelestarian, dan Agenda Aksi.....	35
Dari Memori ke Kebijakan.....	35
Bab V Penutup.....	40
Menjaga Api Fajar di Bumi Tadulako.....	40
Glosarium	43
A.....	43
B	43
C	44
D.....	44
E	45
F	45

G.....	45
H.....	46
I	46
J	46
K.....	47
L	47
M.....	48
N.....	48
O.....	49
P	49
R.....	49
S	50
T	50
U.....	51
V.....	51
W.....	52
Y.....	52
Daftar Pustaka	53

Bab I Pendahuluan

Sejarah Perlawanan di Sulawesi Tengah

Sulawesi Tengah sejak akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20 menempatkan dirinya pada persimpangan dinamika yang menentukan nasib kawasan: di satu sisi terdapat tatanan kekuasaan tradisional yang berakar kuat dalam struktur kerajaan-kerajaan lokal, adat-istiadat, dan legitimasi ritus, sementara di sisi lain muncul tekanan besar dari kekuatan kolonial yang berupaya merestrukturisasi ruang politik dan ekonomi demi kepentingan ekspansi dan akumulasi modal. Pertemuan kedua kutub kekuatan ini tidak bersifat homogen; ia memanifestasi beragam cara resistensi yang dipengaruhi oleh topografi, jaringan sosial, dan konfigurasi kepentingan lokal. Garis pantai yang panjang menjadikan pelabuhan-pelabuhan kecil titik sentral bagi interaksi komersial dan kontrol administratif kolonial, sementara lembah-lembah, pegunungan, dan hutan lebat menyediakan medan taktis bagi strategi perlindungan dan operasi gerilya. Dalam kerangka itu, perlawanan di Sulawesi Tengah harus dipahami bukan sekadar sebagai serangkaian bentrokan bersenjata, melainkan sebagai proses politik jangka panjang di mana komunitas lokal menegosiasikan kembali kedaulatan, sumber daya, dan arti identitas kolektifnya.

Secara lebih konkret, akar-akar perlawanan sering bersumber dari reaksi terhadap kebijakan hukum dan fiskal yang dipaksakan oleh otoritas kolonial. Upaya-upaya legalisasi kontrol yang dalam beberapa teks disebut sebagai serangkaian perjanjian pendek atau klausa pengakuan

mendorong situasi di mana penguasa tradisional dipaksa mengakui yurisdiksi eksternal atas tanah, pajak, dan hak komersial. Ketika prosedur-prosedur administrasi kolonial merambah hingga ke tingkat desa memungut pajak, menata kembali sistem kepemilikan tanah, atau menerapkan monopoli perdagangan, sehingga muncul resistensi yang terstruktur, diantaranya perlawanan fiskal, boikot perdagangan, dan pemberontakan bersenjata pada titik-titik tertentu. Fenomena yang sering disebut dalam sumber lokal sebagai “perang pajak”, khususnya pada kasus-kasus seperti Toli-Toli, mengandung lebih dari sekadar penolakan terhadap pungutan; ia adalah perlawanan simbolik terhadap upaya kolonial yang merongrong kemandirian ekonomi masyarakat dan menghina tatanan adat yang lama menjadi dasar kesejahteraan komunal.

Perbedaan medan alam turut membentuk jenis taktik yang dipakai komunitas. Di daerah pesisir dan kawasan pelabuhan kolonial, konflik cenderung mengambil bentuk benturan frontal: patroli administratif, operasi penangkapan pemimpin, atau pembatasan akses pasar. Sebaliknya, wilayah pegunungan dan lembah menyediakan lingkungan yang kondusif bagi operasi gerilya mobilitas cepat, pengetahuan lintas jalur semita, serta pangkalan logistik tersamar yang membuat intervensi militer kolonial menjadi mahal, baik dari segi material maupun legitimasi politik. Kombinasi antara taktik defensif yang memanfaatkan morfologi lahan dan kemampuan masyarakat untuk menyembunyikan serta merestorasi sumber daya lokal menghasilkan tekanan berkepanjangan terhadap upaya penetrasi kolonial; tekanan itu pada gilirannya

memperpanjang konflik dan memaksa pihak-pihak luar untuk menimbang ulang strategi kontrol mereka.

Di samping faktor lingkungan dan ekonomi, dimensi kultural-spiritual memainkan peranan krusial dalam menyusun koherensi sosial yang mendukung perlawanan. Tokoh-tokoh adat, ulama, dan pemimpin karismatik sering memegang posisi ganda: sebagai penjaga tradisi ritual sekaligus aktor politik yang mampu menyatukan berbagai kelompok etnik di wilayah yang plural. Kepercayaan pada karamah, merupakan otoritas moral atau spiritual yang oleh komunitas dipercaya memiliki kekuatan khusus, memfasilitasi legitimasionalisasi tindakan kolektif, sehingga aksi perlawanan tidak hanya dipandang sebagai tindakan militer tetapi juga sebagai upaya pemeliharaan tatanan kosmologis dan moral komunitas masyarakat. Ritual-ritual adat, gelar-gelar kepemimpinan, dan rangkaian sumpah kolektif menjadi medium efektif untuk merangkul dukungan lintas suku dan kelas, melalui medium inilah jaringan solidaritas terjalin dan sumber daya, material dan simbolik dimobilisasi untuk tujuan bersama.

Peralihan dari resistensi yang berakar pada legitimasi kerajaan ke bentuk mobilisasi massa yang lebih bersifat nasionalis merupakan proses bertahap yang dipengaruhi oleh dua rangkaian perubahan utama. Pertama, penetrasi ide-ide modern (nasionalisme, pendidikan, pers politik) yang dibawa melalui jalur-jalur perkotaan dan komunikasi mengikis monopoli elite tradisional atas wacana politik; kedua, pengalaman bersama selama masa pendudukan Perang Dunia II dan periode pascaperang mempercepat pembentukan identitas kolektif yang melampaui batas-batas keraton. Pada

fase ini, sejumlah pemimpin lokal memilih strategi baru: menempatkan otoritas tradisional sebagai basis legitimasi untuk bergabung pada perjuangan republik menggunakan gelar dan jaringan adat untuk meraih dukungan massa bagi tujuan yang lebih luas, sementara yang lain mempertahankan orientasi lokal yang lebih protektif terhadap hak-hak komunitas mereka. Transformasi ini mendorong lahirnya tokoh-tokoh hibrid, pemimpin berwajah tradisional namun berpikir strategis dalam kerangka modernitas politik yang menjadi penghubung antara komunitas lokal dan proyek negara nasional.

Selain itu, perlawanan di Sulawesi Tengah mesti ditempatkan dalam relasi yang lebih luas: antara pengalaman kolonial di Nusantara, dinamika regional di Sulawesi, dan arus geopolitik Asia Tenggara. Interaksi dengan jaringan perdagangan Maritim, keterlibatan aktor luar seperti kompeni Belanda, dan periode singkat pendudukan Jepang semuanya mewarnai cara perlawanan diorganisasikan dan dikomunikasikan. Misalnya, kebijakan pendudukan Jepang yang mengorganisir kembali administrasi lokal menciptakan celah dimana struktur sosial tradisional dipaksa beradaptasi, sehingga ketika kekuasaan kolonial lama mencoba kembali setelah 1945, masyarakat lokal sudah memiliki pengalaman mobilisasi dan negosiasi baru yang memengaruhi pilihan-pilihan politik mereka. Oleh karena itu, memahami perlawanan di Sulawesi Tengah berarti membaca bagaimana faktor lokal (adat, medan, organisasi sosial) berinteraksi dengan dinamika eksternal (kebijakan kolonial, perang global, ideologi nasional) dalam jangka panjang.

Akhirnya, jejak perlawanan itu meninggalkan warisan ganda: materi (kerusakan, reposisi kepemilikan tanah, perubahan struktur pemerintahan) dan immateriil (memori kolektif, mitos kepahlawanan, tradisi politik baru). Warisan-warisan ini turut menentukan cara masyarakat Sulawesi Tengah membaca masa lalu dan menyusun strategi pembangunan masa kini. Buku ini hadir sebagai upaya mendokumentasikan fragmen-fragmen memori itu melalui potret, biografi singkat, dan analisis kontekstual dengan tujuan bukan sekadar mengenang tindakan heroik, melainkan memahami mekanisme sosial yang melahirkan tindakan tersebut. Bab-bab berikutnya akan memetakan tokoh-tokoh yang muncul dari medan-medan konflik ini, menempatkan setiap biografi pada konteks wilayah dan periode perjuangan, serta membuka ruang verifikasi untuk menyambung arsip lisan ke arsip tertulis. Dengan demikian pembaca diundang untuk tidak hanya membaca kisah kepahlawanan secara sentimental, tetapi mengkajinya sebagai bagian dari konstruksi sejarah lokal yang dinamis dan terus berproses.

Bab II Klasifikasi Wilayah dan Periode Perjuangan

Pejuang asal Sulawesi Tengah

Naskah ini memetakan 25 tokoh pejuang menurut wilayah operasi dan periode perjuangan, dan menyajikan biografi singkat dengan konteks lokal-nasional. Pembagian wilayah (Palu, Sigi, Donggala, Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una, Tolitoli, Buol, Banggai Laut, Banggai Kepulauan dan Luwuk) mencerminkan ragam medan konflik dari pertempuran langsung melawan kebijakan kolonial sampai peran diplomatik ketika republik sedang merumuskan kembali batas-batas administrasi.

Pemetaan ini tidak semata-mata bersifat geografis, melainkan merupakan upaya analitis untuk membaca pola perjuangan secara lebih sistematis dan komparatif. Setiap wilayah memiliki karakter sosial, struktur kekuasaan, serta pengalaman kolonial yang berbeda-beda, sehingga bentuk resistensi yang muncul pun memperlihatkan corak yang khas. Palu dan Donggala, sebagai wilayah pesisir dan pusat interaksi dagang, cenderung menjadi arena tarik-menarik diplomasi dan kontrol administratif, sementara Sigi dan wilayah pedalaman lainnya memperlihatkan dinamika perlawanan berbasis jaringan adat dan penguasaan medan pegunungan. Poso dan Parigi Moutong mencerminkan kombinasi antara respons ekonomi dan solidaritas komunal, sedangkan kawasan kepulauan seperti Banggai Laut dan Banggai Kepulauan menghadirkan dimensi maritim yang memperkaya strategi pertahanan dan

komunikasi antarkomunitas. Dengan mengelompokkan tokoh-tokoh ini berdasarkan wilayah operasional dan periode sejarahnya, pembaca dapat melihat bagaimana perlawanan di Sulawesi Tengah tidak berdiri sebagai fragmen-fragmen terpisah, tetapi sebagai mozaik yang saling berkaitan dalam rentang waktu yang panjang. Pola-pola kepemimpinan, jenis taktik, serta pergeseran orientasi politik dari era kolonial menuju era kemerdekaan akan tampak lebih jelas ketika dibaca melalui kerangka klasifikasi ini. Dengan demikian, tabel berikut bukan sekadar daftar nama dan tempat, melainkan peta historiografis yang membantu menempatkan setiap tokoh dalam konteks ruang dan waktu perjuangannya.

Pertama, dari daerah pesisir yang mengitari pusat administrasi khususnya dari wilayah Palu dan Donggala muncul tokoh-tokoh yang menempuh pendekatan ganda: mereka memainkan peran representatif di meja perundingan sekaligus menjadi poros mobilisasi publik ketika diplomasi gagal mengamankan hak komunitas. Sejumlah catatan lisan dan foto arsip menyimpan memori tentang pemimpin lokal yang tidak saja menandatangani pernyataan pro-nasional tetapi juga turun ke pasar dan pelabuhan untuk menggalang dukungan. Dalam narasi kolektif di kota-kota ini kita membaca suatu pola: elite tradisional menggunakan reputasi gelar, upacara, dan simbol publik sebagai alat legitimasi untuk menarik massa, sementara kaum muda dan buruh pelabuhan melakukan aksi ekonomi yang menekan roda perdagangan kolonial. Kisah-kisah singkat yang beredar di antara keluarga keturunan menggambarkan malam-malam pertemuan yang dirahasiakan, rencana pembebasan tahanan politik, atau boikot komoditas tertentu yang berdampak pada pendapatan administrasi kolonial; episod-episod semacam ini harus dilengkapi

dengan pemeriksaan arsip kantor residen, catatan kepolisian Hindia Belanda, dan koran lokal zaman itu untuk menempatkan setiap klaim pada tanggal dan nama yang tepat.

Kedua, di dataran tinggi dan lembah-lembah pedalaman seperti yang kita kenal di Sigi dan sebagian kawasan Poso, kisah pejuang seringkali bercampur kuat dengan struktur adat yang memayungi komunitas. Pemimpin di sini lebih sering muncul dari garis keturunan yang diasosiasikan dengan fungsi perlindungan desa, mereka adalah penjaga hukum adat sekaligus komandan taktis ketika situasi mengharuskan. Narasi yang terwariskan menceritakan bagaimana unit-unit kecil bergerak malam hari menutup jalur logistik lawan, memutus pengiriman barang, atau memanfaatkan sistem gua dan jalur pegunungan untuk memindahkan keluarga dan pasukan kecil dari satu basis ke basis lain. Narasi personal-lokal ini penting karena menunjukkan bagaimana perlawanan bukan hanya soal senjata, tetapi juga soal teknik ketahanan sosial: pembagian makanan, pengetahuan obat tradisional, dan rangkaian sumpah kolektif yang mengikat sumber daya emosional dan material komunitas pada proyek perlawanan. Untuk memverifikasi detail-detail ini, perlu ditelusuri laporan misi militer kolonial, memo administrasi wilayah, dan yang tak kalah penting rekaman lisan dari tetua desa yang masih hidup.

Ketiga, kawasan Parigi Moutong dan sejumlah bagian Poso memperlihatkan bentuk perlawanan yang lahir dari persoalan ekonomi lokal, penyusutan akses terhadap sumber daya perikanan, pembatasan kebun, dan kewajiban pajak baru yang memicu protes berulang. Di sana tampil figur-figur yang bisa disebut sebagai 'pemimpin ekonomi', tokoh yang meskipun tidak selalu memegang gelar adat formal, memiliki

kapasitas mobilisasi karena posisi mereka dalam jaringan komersial lokal: nelayan kepala rombongan, pengumpul hasil kebun, atau pemilik warung yang menjadi titik temu informasi. Mereka mengorganisir boikot, menata rute distribusi alternatif, dan ketika perlu mengoordinasikan serangan-serangan terfokus terhadap gudang-gudang persediaan kolonial. Cerita singkat tentang upaya-upaya semacam ini, terabadikan dalam surat-surut keluarga serta nota notulen kelompok pedagang lokal, harus dilengkapi dengan pemeriksaan arsip perdagangan kolonial serta dokumen sipil yang merekam peristiwa penangkapan, denda, atau litigasi yang mengikutinya.

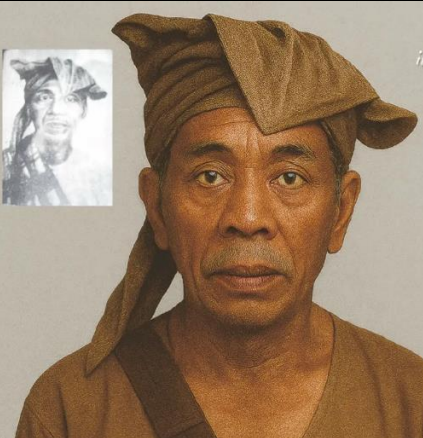
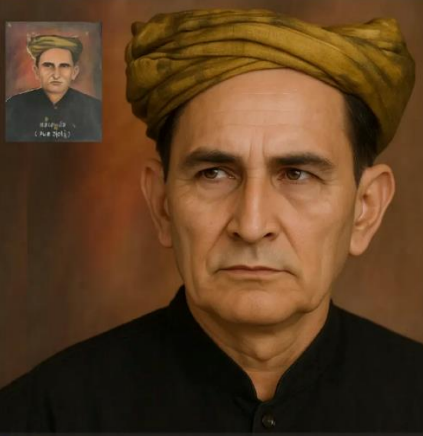
Keempat, di wilayah kepulauan termasuk Banggai Laut, Banggai Kepulauan dan Luwuk, perlawanan memperoleh dimensi maritim yang khas: mobilitas laut menjadi alat utama komunikasi dan pengangkutan, sehingga strategi perlawanan menggabungkan pengetahuan pelayaran tradisional, penggunaan pulau-pulau kecil sebagai pangkalan sementara, serta jaringan pelabuhan kecil yang saling menopang. Di sini, pejuang kerap muncul dari komunitas pelaut dan kepala kampung pantai yang menguasai peta arus, mangsa, dan lubang-lubang jangkar musuh; keberanian mereka sering diuji pada operasi-operasi malam yang menenggelamkan kapal persediaan lawan atau memutus rute suplai. Narasi-narasi keluarga menyebutkan aksi-aksi simbolis seperti pembakaran tiang gudang atau pembebasan nelayan yang ditangkap, namun untuk mengubah kisah lisan ini menjadi fakta sejarah perlu kombinasi sumber: catatan log pelayaran kolonial, laporan kapten kapal, serta dokumen pengadilan setempat yang mencatat tindakan-tindakan represif berikutnya.

Kelima, dalam beberapa kasus misalnya sejumlah tokoh dari Tojo Una-Una, Tolitoli dan Buol, kisah perlawanan juga bercampur peran diplomatik: para pemimpin menganggap dialog, perundingan, bahkan penandatanganan deklarasi sebagai bagian strategi. Mereka memanfaatkan pertemuan resmi yang dimediasi oleh residen, pemimpin misi, atau komisioner sebagai panggung untuk menegosiasikan hak-hak communal, meminta pencabutan kebijakan yang paling menekan, atau menegaskan dukungan terhadap republik yang baru lahir. Di arsip, kita menemukan dokumen-dokumen perjanjian kecil, surat protes, dan notulen pertemuan yang menerangkan kompromi-kompromi semacam itu. Kunci untuk memahami ambivalensi peran tokoh-tokoh ini: kadang berlabel kolaborator di mata administrasi kolonial, namun tetap dipuja sebagai pejuang oleh para pengikutnya karena kemampuan mereka menyelamatkan aspek kunci kehidupan komunitas masyarakat. Verifikasi terhadap peran ini memerlukan pembacaan kritis dokumen resmi dan pencocokan dengan memori lisan agar kita memahami kenapa sebuah tindakan diplomatik pada satu waktu kemudian dibaca sebagai bentuk perlawanan pada waktu lain.

Akhirnya, kumpulan potret dan sketsa biografis yang disusun dalam buku ini memperlihatkan pluralitas strategi dari perlawanan terbuka sampai negosiasi tertutup yang semuanya menjadikan Sulawesi Tengah sebuah laboratorium perjuangan lokal dengan keluasan jaringan sosial yang menghubungkan desa, kota, laut, dan gunung. Setiap kisah singkat yang kami hadirkan di halaman-halaman berikut berakar pada bahan visual dan catatan lisan yang tersimpan dalam koleksi ini, tetapi untuk menjadikan setiap profil sebagai data sejarah yang kuat kami

merekomendasikan langkah dokumenter berikut sebelum publikasi akhir: (1) triangulasi antara foto, dokumen administrasi kolonial, dan arsip lokal; (2) wawancara terstruktur dengan setidaknya dua sumber lisan independen per tokoh; serta (3) penelusuran dokumen kependudukan dan pengadilan yang dapat mengukuhkan peristiwa penting dalam biografi mereka. Dengan pendekatan verifikasi seperti itu, biografi-biografi singkat berikut bukan hanya menjadi narasi penghormatan, melainkan bagian dari fondasi historis yang dapat dipergunakan untuk studi lanjutan, pendidikan lokal, dan penguatan memori kolektif di Sulawesi Tengah.

Kelompok Wilayah	Periode Perjuangan	Biografi Singkat
Palu	Era Perlawanan Kolonial	 Pue Songgolangi Peran: Tadulako (panglima perang) Kerajaan Tatanga di bawah Ratu Rangigamagi, simbol keberanian adat melawan kolonialisme @fahrul_islami Perjuangan: Pimpin perlawanan melawan Belanda lewat gerilya demi membela kehormatan adat dan tanah leluhur Pengorbanan: Tinggalkan kenyamanan hidup bangsawan, totalitas perlawanan terhadap Belanda, ditangkap dan dihukum mati karena perjuangannya di Lembah Palu Warisan: Dikenang sebagai pahlawan lokal Palu, namanya diabadikan lewat nama jalan dan Tugu Songgolangi

Donggala	Era Perlawanan Kolonial	 <i>ilustrasi</i> La Makagili (Pue Nggeu/Toma I Doda) 1. Peran: Raja Banawa VIII (1889–1902), pindahkan pemerintahan dari Pudjananti ke Donggala dan jadikan Donggala sebagai Kerajaan Banawa 2. Perjuangan: Menolak dominasi Belanda, pemimpin rakyat Banawa melawan kolonialisme dikenal pemimpin yang berani dan tegas 3. Pengorbanan: Ditangkap Belanda karena perlawanan terhadap kolonial, diasingkan ke Makassar - Gowa dan wafat di pengasingan 4. Warisan: Dikenang sebagai raja pejuang anti-kolonial, simbol perlawanan rakyat Banawa di Donggala
Donggala	Era Perlawanan Kolonial	 <i>ilustrasi</i> Malonda (Lamalonda/Aru Bale) 1. Lahir: Sekitar tahun 1800 2. Peran: Raja Gunung Bale VI, pemimpin Perang Donggala melawan Belanda, tokoh pemimpin adat Donggala 3. Perjuangan: Menolak perjanjian kolonial Belanda dan memimpin perlawanan bersenjata tradisional 4. Pengorbanan: Kehilangan jabatan, banyak pasukannya gugur, hidup dalam tekanan dalam mempertahankan harga diri dan kemerdekaan rakyat Donggala 5. Warisan: Dimakamkan di Gunung Bale, dikenang sebagai pejuang lokal dan menjadi bagian penting sejarah warisan Donggala

Parigi Moutong	Era Perlawanan Kolonial	 <i>ilustrasi</i>  Tombolotutu 1. Lahir: Sekitar 1857, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah 2. Peran: Raja Kerajaan Moutong, pemimpin perlawanan anti-kolonial Belanda 3. Perjuangan: Memimpin perlawanan terhadap Belanda, ahli strategi perang gerilya di wilayah pegunungan Parigi 4. Pengorbanan: Menolak tunduk pada Belanda, tinggalkan tahta Bangsawan, hidup dalam pelarian dan perjuangan gerilya hingga akhir hayatnya di Kaleke 5. Warisan: Dianugerahi Pahlawan Nasional (2021), dikenang sebagai tokoh perlawanan dari Sulawesi Tengah
Sigi	Era Perlawanan Kolonial	 <i>ilustrasi</i>  Towua Langi (Tovolangi/Toma I Torengke) 1. Peran: Raja (Magau) Kulawi, memimpin rakyat Perang Bulu Momi (1905) melawan Belanda 2. Perjuangan: Memimpin rakyat Kulawi bertempur melawan Belanda di wilayah pegunungan Bulu Momi, simbol perlawanan Kerajaan Kulawi 3. Pengorbanan: Terpaksa tandatangani perjanjian dengan Belanda pasca kealahannya dalam Perang Kulawi 4. Warisan: Simbol perlawanan rakyat Kulawi, dikenang sebagai pejuang Merah Putih, perlengkapan perangnya disimpan di Museum Sulawesi Tengah

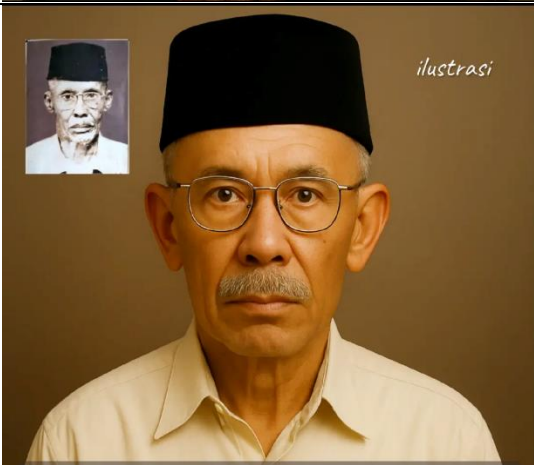
Palu, Donggala	Era Perlawanan Kolonial	  ilustrasi Pue Lasadindi (Mangge Rante/Datokarama III) 1. Lahir: Sekitar 1828, Desa Enu, Sindue, Donggala 2. Peran: Ulama, bangsawan, tokoh adat dan spiritual, pejuang kemerdekaan di Tanah Kaili 3. Perjuangan: Pimpin perlawanan rakyat Kaili lawan Belanda dalam Perang Kayumalue, Gunung Bale, Dolo, Sojol, dan Tojo Una-Una, aktif dakwah dan pendidikan Islam 4. Pengorbanan: Meninggalkan jabatan bangsawan dipenjarakan beberapa kali oleh Belanda 5. Warisan: Makamnya tempat ziarah, dikenang sebagai pejuang lokal, patung/monumen di Donggala dan ajarannya jadi pedoman moral masyarakat Kaili
Palu	Era Awal Islam Lokal	  ilustrasi Dato Karama (Syekh Abdullah Raqie) 1. Lahir: Sekitar abad ke-17, Minangkabau (Pagaruyung) 2. Peran: Ulama Minangkabau pertama menyebarkan Islam di Lembah Palu dan wilayah Kaili 3. Perjuangan: Dakwah damai dan karismatik, mengajak Raja Ipue Nyidi dan masyarakat Kaili memeluk Islam, mendirikan surau/masjid sebagai pusat pendidikan agama 4. Pengorbanan: Meninggalkan kampung halaman, menempuh pelayaran berbahaya dan menetap selamanya di Palu demi menyebarkan ajaran Islam 5. Warisan: Namanya diabadikan nama masjid, kampus (UIN Datokarama Palu), nama jalan dan makamnya jadi situs ziarah dan budaya

Palu, Tojo Una-una, Donggala, Sigi	Era Perlawanan Kolonial	<i>ilustrasi</i> Guru Tua (Sayyid Idrus bin Salim al-Jufri) Lahir: Sekitar 1892, Tarim, Hadramaut, Yaman Peran: Ulama, pendidik, pendiri Alkhairaat, tokoh besar Islam di Indonesia Timur Perjuangan: Melawan kolonialisme melalui pendidikan dan dakwah, mendirikan sekolah Islam Alkhairaat Pengorbanan: Tinggalkan jabatan tinggi di Yaman, hadapi tekanan penjajah, jalankan pendidikan tanpa biaya Warisan: Ribuan lembaga pendidikan & layanan sosial, haul, nama bandara dan Bintang Mahaputera Nararya
Donggala, Sigi	Era Perlawanan Kolonial	<i>ilustrasi</i> Umar Papeo Lahir: Diperkirakan Sekitar awal 1920-an Peran: Pimpinan Staf Umum dalam Gerakan Merah Putih Donggala, organisasi pejuang anti-kolonial pada 1945 Perjuangan: Aktif dalam gerakan anti-Belanda (NICA), pejuang strategis di Sidera bersama tokoh @fahru_islami pro-kemerdekaan Gerakan Merah Putih Sulteng Pengorbanan: Hadapi tekanan, ancaman dan penangkapan oleh KNIL dan Belanda, keterlibatannya Laskar PIM dan Gerakan Merah Putih Donggala Warisan: Dikenang sebagai pejuang Laskar PIM Donggala, simbol keberanian rakyat, dan inspirasi lintas batas yang gugur di pengasingan Filipina

Poso	Era Perlawanan Kolonial	 Talasa (Nduwa) 1. Lahir: Diperkirakan sekitar 1880-an 2. Peran: Raja Kerajaan Poso terakhir, tokoh adat yang netral dan mempersatu masyarakat Pamona 3. Perjuangan: Menjaga perdamaian suku di Poso, mempertahankan kepercayaan leluhur di tengah tekanan agama & kolonial penjajah Belanda 4. Pengorbanan: Hadapi tekanan kolonial dan agama, tetap teguh sebagai pelindung adat dan pemimpin moral dan budaya. 5. Warisan: Dikenang sebagai simbol toleransi dan mempersatu budaya, raja yang bijak dan tokoh adat yang dihormati di sejarah Poso
Parigi Moutong	Era Perlawanan Kolonial	 Abdul Wahid Toana 1. Lahir: Sekitar awal abad ke-20, Dolago Parigi, Sulteng 2. Peran: Pemimpin gerakan rakyat, tokoh perlawanan anti-kolonial Belanda di Parigi 3. Perjuangan: Memimpin gerakan rakyat melawan pajak dan kerja paksa Belanda dalam Peristiwa Dolago (1936) 4. Pengorbanan: Ditangkap, dipenjara oleh Belanda, Tidak mendapat proses hukum yang adil serta ditahan bersama rekan seperjuangan 5. Warisan: Simbol perlawanan rakyat Dolago dan Parigi, dikenang dalam sejarah lokal sebagai tokoh perlawanan kolonial Belanda

Poso	Era Perlawanan Kolonial	 <i>ilustrasi</i> Mpolite (Inana Moso) 1. Peran: Ratu dan simbol kepemimpinan perempuan di Kerajaan Lore, mendampingi Raja Kabo 2. Perjuangan: Mendukung Perang Peore (1907) melawan Belanda, mengibarkan kain putih untuk hentikan kekerasan 3. Pengorbanan: Menyerahkan kekuasaan secara simbolik demi stabilitas rakyat dan budaya 4. Warisan: Dikenang sebagai pemimpin perempuan adat, diwariskan lewat monumen, sejarah lokal dan budaya Lore
Palu	Era Perlawanan Kolonial	 <i>ilustrasi</i> Ratu Ranginggamagi 1. Lahir: Diperkirakan sekitar abad ke-19 2. Peran: Baligau (Ratu) Tatanga ke-9, pemimpin adat tertinggi 3. Perjuangan: Menolak tunduk kepada Belanda, tolak menandatangani Korte Verklaring dan pimpin perlawanan rakyat Tatanga melawan kolonial penjajah 4. Pengorbanan: Ditangkap Belanda di Uvempomata, diasingkan ke Nusakambangan - Semarang, Wafat di pengasingan dan makamnya tidak diketahui 5. Warisan: Simbol keberanian perempuan bangsawan Kaili, diabadikan budaya cerita rakyat dan tokoh Patriotisme

Poso	Era Perlawanan Kolonial	 <i>ilustrasi</i> Mokole Marunduh (Datu ri Tana) Peran: Raja Kerajaan Mori, pemersatu suku-suku Mori, tokoh adat dan pejuang anti-kolonial Perjuangan: Pimpin rakyat Mori melawan Belanda pada Perang Wulanderi (1907) dan gugur demi menjaga kedaulatan adat dan kemerdekaan Pengorbanan: Tolak tunduk pada Belanda, hilang kekuasaan dan nyawa demi kedaulatan rakyat Mori Warisan: Dikenang sebagai pejuang lokal, istana mori jadi situs budaya, Simbol Persatuan Suku Mori dan Inspirasi Nasionalisme Lokal
Poso	Era Perlawanan Kolonial	 <i>ilustrasi</i> Mokole Owolu Marunduh Lahir: Sekitar 1875 Peran: Raja Mori XIII, memimpin rakyat Mori di Sulawesi Tengah Perjuangan: Menolak dominasi Belanda, pertahankan kedaulatan lokal, aktif peralihan ke Republik Indonesia Pengorbanan: Hadapi tekanan kolonial, dicopot saat pendudukan Jepang dan kehilangan kekuasaan formal Warisan: Istana Raja Mori jadi cagar budaya, dikenang tokoh adat dan pejuang sebagai simbol perjuangan rakyat Mori di Sulawesi Tengah

Palu	Era Perlawanan Kolonial	 <i>ilustrasi</i> Magau Yojokodi Tomesiema 1. Lahir: Perkiraan sekitar 1840–1855 M 2. Peran: Raja (Magau) Palu, memerintah sekitar 1878–1908 3. Perjuangan: Mempertahankan otoritas kerajaan Palu di tengah tekanan kolonial Belanda dan mempertahankan kedaulatan lokal 4. Pengorbanan: Berkorban mempertahankan kerajaan dan adat saat kekuasaan kolonial berusaha menghapusnya 5. Warisan: Mewariskan garis kerajaan yang dilanjutkan Magau (Raja) Janggola di masa awal kemerdekaan
Palu, Sigi	Era Perlawanan Kolonial	 <i>ilustrasi</i> H. Joto Daeng Pawindu 1. Peran: Ketua Sarekat Islam (SI) wilayah Palu Sulteng, Pendiri & pimpinan Laskar Merah Putih 2. Perjuangan: Aktif memimpin perlawanan rakyat di Palu melawan NICA (Belanda), mengibarkan bendera Merah Putih sebagai simbol kemerdekaan 3. Pengorbanan: Ditangkap dan ditahan oleh pemerintah kolonial Belanda (NICA) karena aktivitas perjuangannya 4. Warisan: Tokoh pejuang lokal, pelopor gerakan rakyat pro-republik lewat SI dan Laskar Merah Putih dan simbol perjuangan rakyat Kaili melawan kolonialisme

Palu, Sigi	Era Perlawanan Kolonial	ilustrasi Djaelangara (Mangge Dempo) 1. Peran: Magau (Raja) ke-7 Kerajaan Tawaeli, pemimpin adat diplomatik dan pelindung tokoh lokal seperti Raja Malonda @fahrul_islami 2. Perjuangan: Menolak dominasi kolonial Belanda, membangun pertahanan lokal dan tokoh pro-rakyat 3. Pengorbanan: Gugur dalam perjuangan melawan kolonial Belanda, kuat dugaan diracun oleh Belanda karena keberpihakan pada tokoh anti-kolonial 4. Warisan: Dikenang sebagai tokoh perlawanan dan simbol keberanian dan integritas kerajaan Tawaeli
Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Luwuk	Era Perlawanan Kolonial	ilustrasi Syukuran Aminuddin Amir 1. Peran: Raja ke-21 Kerajaan Banggai, pemimpin transisi dari kerajaan ke pemerintahan Republik @fahrul_islami 2. Perjuangan: Memimpin dan mendukung integritas Kerajaan Banggai ke dalam wilayah Republik Indonesia 3. Pengorbanan: Melepas kekuasaan sebagai raja demi keutuhan NKRI, hadapi tekanan dan Menjadi teladan dalam transisi dari kerajaan ke republik 4. Warisan: Namanya diabadikan sebagai nama Bandara Luwuk dan monumen patung di Kota Luwuk dan dikenang sebagai pemimpin bijak

Tojo Una-una	Era Perlawanan Kolonial	 <i>ilustrasi</i> Tandjumbulu (Tanjumbulu) Peran: Raja Tojo (1926), memindahkan ibu kota kerajaan dari Taliboi ke Ampana Perjuangan: Memimpin Kerajaan Tojo masa ke-fahar islami Belanda dan Jepang, memindahkan ibu kota ke Ampana sebagai strategi pertahanan Pengorbanan: Ditangkap Jepang karena perlawanannya, wafat dalam tahanan di pengasingan, korbakan tahta, kebebasan dan nyawa demi martabat kerajaan Warisan: Simbol integrasi Tojo ke RI, dikenang sebagai Raja pejuang masa transisi kolonial ke pendudukan Jepang
Luwuk	Era Perlawanan Kolonial	 <i>ilustrasi</i> Abdul Azis Larekeng Lahir: 10 Januari 1923, Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah Peran: Pejuang kemerdekaan, Sekda Sulteng, Bupati Banggai, anggota DPR RI, Ketua Golkar Sulteng Perjuangan: Pejuang Gerakan Merah Putih, Kepala Staf Batalyon IV KRIS, melawan Jepang dan Belanda Pengorbanan: Ditangkap dan disiksa oleh Belanda (1947), dipenjara karena aktivitas perjuangan pro-kemerdekaan Warisan: Dikenang sebagai tokoh pejuang dan pendiri sistem pemerintahan sipil di Sulawesi Tengah

Toli-toli, Buol	Era Perlawanan Kolonial	 <i>ilustrasi</i> La'Noni (Lanoni) 1. Peran: Tokoh utama dan pemimpin rakyat Malomba melawan penjajahan Jepang di Tolitoli 2. Perjuangan: Pimpin perlawanan rakyat Malomba (1945) menolak kerja paksa dan eksploitasi hasil bumi dan membunuh pejabat Jepang (Imaki Ken Kanrikan) 3. Pengorbanan: Gugur dalam pertempuran, banyak warga Malomba ditangkap, disiksa dan dihukum 4. Warisan: Dikenang sebagai pahlawan lokal, namanya diabadikan pada tugu/monumen, edukasi sejarah lokal dan novel "Lanoni: Pejuang Pesisir Timur Nusantara"
Sigi	Era Perlawanan Kolonial	 <i>ilustrasi</i> Karajalembah (Toi Dempo) 1. Lahir: Diperkirakan akhir abad ke-19 2. Peran: Raja Muda (Madika Malolo) Sigi, pemimpin adat dan pejuang melawan penjajahan Belanda 3. Perjuangan: Memimpin Perang Sigi–Dolo lawan Belanda dan menolak kerja paksa serta perjanjian Korte Verklaring 4. Pengorbanan: Ditangkap Belanda (1905) di buang ke Sukabumi, wafat dalam pengasingan dan makamnya dipindahkan ke Watunonju (2006) 5. Warisan: Namanya diabadikan nama jalan dan situs sejarah sebagai Simbol perjuangan rakyat Kaili di Sulteng

Sigi	Era Perlawanan Kolonial	 Datu Pamusu (Magau Dolo) Lahir: Sekitar 1864, Pesaku – Sigi Dolo Peran: Raja (magau) Dolo (pengganti Gantoelemba), tokoh Sarekat Islam (1916) @fahrul_islami Perjuangan: Berperang melawan Belanda, aktif dalam Sarekat Islam, menolak tekanan Belanda keluar dari organisasi pergerakan Pengorbanan: Dilengserkan Belanda sebagai Raja, Kerajaan Dolo dihapus dan dilebur ke wilayah Sigi Warisan: Tokoh perjuangan anti-kolonial sebagai simbol perlawanan lokal namanya diabadikan nama jalan
Palu	Era Kemerdekaan	 Pada masa pemerintahan Raja Idjaza, Souraja beberapa kali mengalami pergantian fungsi yaitu, pada tahun 1921-1942, Souraja masih digunakan sebagai tempat tinggal raja dan pusat pemerintahan. Pada tahun 1942-1945, tepatnya pada masa pendudukan Jepang, Souraja dialih fungsikan sebagai

		tangsi militer tentara Jepang walaupun fungsi Souraja masih tetap sebagai kantor pemerintahan Kerajaan Palu. Pada masa Jepang itu, kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Tengah berubah nama menjadi Suco. Lebih jauh dalam buku “Sejarah daerah Sulawesi Tengah” dijelaskan “kalau pada masa pemerintahan Belanda atasannya (asisten Residen dan Kontrolir) orang Belanda, maka pada zaman Jepang kedudukan ini ditempati oleh Jepang, juga raja-raja tetap, hanya namanya diganti memakai istilah Jepang. Raja disebut Suco dan kepala distrik disebut Gunco. Peranannya pun sama pada zaman Hindia Belanda hingga Kemudian pada tahun 1945-1948, Souraja kembali difungsikan sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Palu.
--	--	---

No.	Nama Tokoh	Wilayah Operasional	Periode	Karakter Perjuangan
1	Pue Songgolangi	Palu	Era Perlawanan Kolonial	Perlawanan berbasis adat dan pertahanan wilayah pedalaman
2	La Makagili	Donggala	Era Perlawanan Kolonial	Mobilisasi masyarakat pesisir
3	Tombolotutu	Parigi Moutong	Era Perlawanan Kolonial	Resistensi terbuka terhadap kolonial
4	Malonda	Donggala	Era Perlawanan Kolonial	Pertahanan struktur adat
5	Towua Langi	Sigi	Era Perlawanan Kolonial	Gerakan taktis pegunungan

6	Pue Lasadindi	Palu, Donggala	Era Perlawanan Kolonial	Organisasi berbasis kekerabatan
7	Guru Tua	Palu, Tojo Una-una, Donggala, Sigi	Era Perlawanan Kolonial	Pendidikan & pembinaan moral
8	Dato Karama	Palu	Era Awal Islam Lokal	Legitimasi spiritual & sosial
9	Umar Papeo	Donggala, Sigi	Era Perlawanan Kolonial	Mobilisasi ekonomi
10	Talasa	Poso	Era Perlawanan Kolonial	Solidaritas komunal
11	Mpolite	Poso	Era Perlawanan Kolonial	Pertahanan adat
12	Abdul Wahid Toana	Parigi Moutong	Era Perlawanan Kolonial	Perlawanan administratif
13	Ratu Ranginngamagi	Palu	Era Perlawanan Kolonial	Kepemimpinan tradisional
14	Mokole Marunduh	Poso	Era Perlawanan Kolonial	Diplomasi dan pertahanan adat
15	Magau Yojokodi Tomesiema	Palu	Era Perlawanan Kolonial	Kepemimpinan kerajaan
16	Mokole Owolu Marunduh	Poso	Era Perlawanan Kolonial	Resistensi adat
17	Hj. Joto Daeng Pawindu	Palu, Sigi	Era Perlawanan Kolonial	Dukungan sosial perjuangan

18	Djaelangkara	Palu, Sigi	Era Perlawanan Kolonial	Mobilisasi komunitas
19	Tandjumbulu	Tojo Una- una	Era Perlawanan Kolonial	Perlawanan ekonomi
20	Syukuran Aminuddin Amir	Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Luwuk	Era Perlawanan Kolonial	Konsolidasi Republik
21	Abdul Azis Larekeng	Luwuk	Era Perlawanan Kolonial	Aktivitas politik lokal
22	La'Noni	Toli-toli, Buol	Era Perlawanan Kolonial	Perlawanan fiskal
23	Datu Pamusu	Sigi	Era Perlawanan Kolonial	Kepemimpinan adat
24	Karajalemba	Sigi	Era Perlawanan Kolonial	Gerakan pedalaman
25	Idjaza	Palu	Era Kemerdekaan	Transisi kerajaan— republik

Bab III Refleksi dan Nilai Kepahlawanan

Sintesis Nilai Perjuangan

Menelaah jejak dua puluh lima tokoh pejuang dari berbagai penjuru Sulawesi Tengah mengungkap pola nilai yang berulang dan saling terkait: keteguhan prinsip, keberanian kolektif, kecakapan memanfaatkan kearifan lokal, kemampuan menjembatani pluralitas sosial, serta kesadaran strategis bahwa perjuangan tidak hanya bisa dimenangi dengan senjata tetapi juga melalui pendidikan, diplomasi, dan organisasi. Nilai-nilai ini tampil berlapis: pada permukaan mereka mewujud sebagai tindakan heroik, diantaranya yaitu serangan malam, penyergapan, dan boikot ekonomi. Tetapi bila ditelisik lebih jauh, tindakan-tindakan tersebut selalu ditopang oleh mekanisme sosial yang halus: jaringan solidaritas keluarga, legitimasi ritual, redistribusi pangan, dan perencanaan kolektif yang meminimalkan korban sipil. Dari titik pandang historis, kita tidak boleh memisahkan sikap heroik dari kemampuan organisasional yang memungkinkan heroisme itu muncul secara berulang dan berkelanjutan.

Keteguhan prinsip yang muncul dalam catatan-catatan lisan dan foto-foto arsip bukanlah atribut moral semata; ia berwujud dalam keputusan praktis yang menyelamatkan komunitas, semisalnya menolak peraturan pajak yang menghancurkan mata pencaharian, atau menahan diri dari tindakan pembalasan yang bisa menghancurkan jaringan logistik daerah. Nilai ini tampak pada para pemimpin yang memilih menanggung risiko pribadi demi melindungi hak atas tanah, akses sumber daya, dan otonomi budaya. Keberanian kolektif, yang sering dilukiskan dalam kisah-kisah

pahlawan, sejatinya tumbuh dari budaya gotong royong dan kewajiban sosial: ketika satu keluarga menampung pejuang terluka, keluarga lain menggantikan tugas ladang, sebuah mekanisme sosial yang membuat gerakan perlawanan sulit dipatahkan hanya dengan tindakan militer. Bukti-bukti ini, yang terserak di arsip lokal, catatan administrasi kolonial, dan koleksi foto, memperkuat pemahaman bahwa nilai-nilai kepahlawanan di Sulawesi Tengah bekerja pada level mikro (rumah, kampung), meso (desa, kecamatan) dan makro (wilayah), sehingga efeknya bersifat multiperspektif.

Kapasitas para pemimpin daerah dalam mengelola pluralitas sosial juga merupakan aspek sentral yang patut dicatat. Di kawasan seperti Palu, Poso dan Banggai Laut/Banggai Kepulauan, struktur komunitas terdiri dari berbagai kelompok etnis, agama, dan profesi yang memiliki kepentingan berbeda. Faktor keberhasilan mobilisasi bukan semata legitimasi seorang raja atau kepala adat, melainkan kemampuan memformalkan tuntutan-tuntutan lokal menjadi agenda bersama, misalnya mengikat tuntutan ekonomi dalam bentuk boikot bersama atau menempatkan tuntutan politik dalam bahasa adat yang dapat diterima lintas kelompok. Tokoh-tokoh yang mampu bertindak sebagai mediator mengubah gelar dan ritual menjadi alat legitimasi gerakan, juga seringkali membuktikan bahwa kepemimpinan efektif adalah kepemimpinan yang mampu menggabungkan simbolik dan instrumental.

Kearifan lokal juga muncul sebagai strategi politik yang konkret dan adaptif. Pengetahuan tentang medan, yaitu jalur semita, musim, sumber air memberi keunggulan taktis; Ritual dan Struktur Adat menyediakan kapasitas mobilisasi yang cepat; Praktik redistribusi membuat logistik

perlawanan tetap hidup; dan Sistem hukuman-sosial (sumpah, denda adat) membantu menegakkan disiplin internal. Semua ini menunjukkan bahwa kearifan lokal bukan bahan museum, melainkan alat manajerial sosial yang sangat relevan bagi studi tentang resistensi. Oleh karena itu, ketika kita mencoba menerjemahkan nilai-nilai kepahlawanan ke dalam program pendidikan atau kebijakan publik, penting untuk menaruh kearifan ini di pusat desain, bukan sekadar sebagai barang simbolik yang dikurasi dalam pameran. Prinsip ini juga sejalan dengan gagasan perlindungan warisan budaya yang mendorong partisipasi komunitas sebagai aktor utama dalam pelestarian.

Selain dimensi tradisional, analisis sumber menegaskan peran jalur intelektual dan diplomasi: surat-menyurat, pertemuan resimen lokal, penggunaan koran dan temu tokoh urban memperluas repertoar perlawanan dari konflik fisik ke arena wacana. Banyak pemimpin lokal yang kita kenal melalui foto tidak sekadar berperang; mereka menulis, berunding, dan mengorganisir melalui jalur non-kekerasan untuk memperoleh konsesi administratif atau menarik dukungan publik. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan di tingkat lokal bukanlah monolitik: ia adalah kombinasi tindakan langsung dan strategi diplomatik yang saling menguatkan. Pengakuan atas jalur intelektual ini penting saat kita merancang kurikulum lokal agar anak didik memahami bahwa pertahanan hak kolektif juga terjadi lewat tulisan, organisasi, dan negosiasi formal.

Bagi generasi muda, pewarisan nilai-nilai tersebut harus melampaui retorika kenegaraan; ini soal merancang kebijakan dan praktik yang menerjemahkan keteguhan prinsip menjadi tata kelola yang akuntabel,

keberanian menjadi kapasitas inovasi dan kewirausahaan, serta solidaritas lintas komunitas menjadi strategi pembangunan yang inklusif. Implementasi praktisnya meliputi: memasukkan materi sejarah lokal ke dalam kurikulum formal sebagai muatan lokal yang kontekstual dan berbasis bukti; mengembangkan program pembelajaran pengalaman lapangan (fieldwork) bersama penutur lokal; serta mendukung inisiatif komunitas untuk membangun arsip lisan dan digital yang dapat diakses publik. Langkah-langkah seperti ini bukan hanya menghormati jasa para pahlawan, tetapi juga menjadikan jejak perjuangan sebagai modal sosial yang bisa dimobilisasi untuk pembangunan masa kini, sesuai dengan kebijakan kurikulum yang mendorong relevansi lokal dalam pembelajaran.

Sebagai penutup reflektif, menghormati mereka yang berjuang mensyaratkan kerja kolektif: verifikasi narasi, pelestarian artefak, penyusunan arsip yang dapat diakses, dan integrasi warisan ke dalam praktik pendidikan serta kebijakan publik. Buku ini, yang menggabungkan potret, biografi singkat, dan analisis kontekstual, bertujuan membuka ruang bagi proses itu, yaitu mengundang peneliti, pendidik, pembuat kebijakan, dan komunitas lokal untuk bersama-sama menata memori kolektif sehingga Fajar di Bumi Tadulako tidak hanya menjadi metafora, melainkan proyek berkelanjutan dalam membangun identitas dan kapasitas daerah.

Bab IV Warisan, Pelestarian, dan Agenda Aksi

Dari Memori ke Kebijakan

Buku ini, yang berpijak pada kumpulan foto, catatan lisan, dan arsip yang dihimpun dalam Fajar di Bumi Tadulako, menuntut langkah-langkah terukur agar memori kolektif tidak sekadar tersimpan sebagai objek sentimental tetapi menjadi sumber daya berkelanjutan bagi pembangunan daerah. Pelestarian warisan perjuangan harus dipandang sebagai pekerjaan hibrida: bagian konservasi, bagian pendidikan, dan bagian kebijakan publik. Oleh karena itu, strategi yang diusulkan mengutamakan sinergi antaraktor, yaitu pemerintah daerah, dinas pendidikan, dinas kebudayaan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas penutur, dengan tujuan akhir menjadikan memori sejarah sebagai modal sosial yang nyata, dapat diakses, dan terlindungi secara hukum.

Pertama, pada ranah pendidikan, pengintegrasian sejarah daerah ke dalam muatan pembelajaran harus dilakukan secara sistematis dan berbasis verifikasi sumber. Kolaborasi antara sekolah dan komunitas perlu menghasilkan modul ajar yang memuat silabus, RPP/RPP+ yang kontekstual, lembar kerja siswa, serta paket kegiatan lapangan (fieldwork) yang aman dan etis. Perumusan modul seperti itu hendaknya mengacu pada pedoman nasional yang berlaku dan mengutamakan validasi lokal: guru dan siswa bukan hanya menghafal narasi pahlawan, melainkan dilatih melakukan triangulasi sumber, yaitu mencocokkan foto, dokumen, dan kesaksian, sehingga pembelajaran sejarah menjadi praktik ilmiah sekaligus penguatan identitas. Untuk melancarkan proses ini, perlu ada

fasilitasi dari pemerintah provinsi dan dinas terkait agar pelaksanaan pilot dapat direplikasi secara bertahap di sekolah-sekolah dasar dan menengah.

Kedua, pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) dan proyek komunitas harus menjadi metode utama dalam menyalurkan ingatan kolektif kepada generasi muda. Siswa dapat diberi tugas menyusun peta memori desa, mewawancarai narasumber, atau menyusun mini-arsip keluarga yang kemudian dikomparasikan dengan koleksi institusional. Praktik semacam ini mengajarkan kompetensi akademik: mencatat, menganalisis sumber, menulis ringkasan serta membangun hubungan lintas generasi: anak muda belajar dari tetua, sementara komunitas memperoleh dokumentasi yang dapat diwariskan. Penilaian berbasis portofolio adalah instrumen yang tepat untuk mengakui usaha-usaha ini dalam kerangka kurikulum formal, karena menempatkan proses pengumpulan bukti sebagai bagian dari capaian pembelajaran.

Ketiga, penguatan kapasitas pendidik dan penyedia bahan ajar merupakan prasyarat implementasi yang efektif. Pelatihan guru muatan lokal, workshop metodologi sejarah lisan, serta pendampingan teknis dalam pembuatan sumber belajar harus difasilitasi oleh dinas pendidikan yang didukung oleh akademisi dan arsiparis. Sumber belajar yang disusun hendaknya mengikuti standar pedagogis, yaitu jalur pembelajaran yang jelas, rubrik penilaian, lembar kerja terstruktur serta memuat panduan etis untuk interaksi dengan narasumber; demikian pula, guru harus memperoleh alat sederhana untuk mendokumentasikan (contoh: rekaman audio berkualitas dasar, kamera sederhana, format wawancara terstandar) sehingga kualitas data lapangan dapat dipertanggungjawabkan.

Keempat, pada bidang arsip dan dokumentasi harus diberlakukan prinsip triangulasi dan standarisasi metadata untuk semua item yang ingin dipublikasikan. Foto, transkrip wawancara, dan dokumen administrasi perlu diberi label metadata yang konsisten: nama tokoh (beserta varian ejaan), wilayah operasi, perkiraan tahun, sumber koleksi, serta status verifikasi. Upaya digitalisasi harus berjalan beriringan dengan pembangunan repositori yang dapat diakses publik, portal arsip provinsi atau perpustakaan digital sehingga peneliti, guru, dan masyarakat dapat mencari berdasarkan nama, wilayah, atau tema. Dalam merancang sistem ini perlu merujuk pada praktik internasional terbaik tentang pelibatan komunitas dalam pelestarian warisan; pedoman dari UNESCO memberi kerangka nilai dan prosedur yang relevan untuk memastikan partisipasi komunitas, tata kelola etis, dan keberlanjutan teknis.

Kelima, aspek keamanan data dan etika harus menjadi konsiderans utama. Setiap proses perekaman atau publikasi harus memperoleh persetujuan narasumber (informed consent) dan menetapkan batas akses untuk materi sensitif yang dapat menimbulkan resiko bagi individu atau kelompok. Kebijakan penggunaan komersial atas materi harus jelas: kompensasi dan pembagian manfaat terhadap komunitas sumber harus diatur sehingga dokumentasi tidak menjadi bentuk eksploitasi. Prinsip transparansi, pengakuan kontributor, dan pembagian manfaat yang adil menjadi landasan etis bagi setiap proyek pelestarian.

Keenam, perlindungan hukum dan pengakuan formal melengkapi upaya pelestarian praktis. Inventarisasi situs bersejarah, diantaranya adalah souraja, pusara pahlawan, bangunan administrasi tempo dulu, serta lokasi pertempuran, yang harus dilakukan untuk mendaftarkan sejumlah

objek ke dalam daftar cagar budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mendapat jaminan perlindungan hukum dan akses terhadap sumber pendanaan konservasi. Di tingkat komunitas, pemerintah daerah dapat menginisiasi peresmian ruang memori: penempatan prasasti, penataan taman peringatan, dan ritual tahunan yang mengikat pendidikan dan penghormatan publik. Pengakuan semacam ini bukan sekadar simbol; ia membuka ruang bagi generasi sekarang untuk menyaksikan jejak sejarah dalam rupa yang nyata dan terpelihara.

Ketujuh, dimensi ekonomi budaya menawarkan peluang keberlanjutan jika dikelola partisipatif. Pengembangan paket wisata sejarah, festival budaya, buku anak bergambar, serta pertunjukan dramatik yang berbasis riset lokal dapat menjadi sumber pemasukan bagi komunitas sekaligus sarana pendidikan publik. Namun model ekonomi budaya harus dirancang agar komunitas lokal memegang peran sentral dalam pengelolaan dan menerima manfaat finansial yang adil; mekanisme pembagian hasil, dana pemeliharaan situs, serta honorarium bagi narasumber harus diatur sejak awal untuk menghindari ekstraksi budaya oleh pihak luar.

Kedelapan, agenda penelitian yang terintegrasi menjadi fondasi keberlanjutan proyek ini. Prioritas penelitian jangka menengah antara lain: penulisan biografi terverifikasi untuk 8 s.d 12 tokoh utama melalui penelusuran arsip kependudukan dan dokumen administrasi residen; pemetaan medan konflik yang menggabungkan peta topografi dan rute logistik kolonial; studi etnografi tentang praktik memori lokal; serta pengembangan infrastruktur digital, database biografi dan peta interaktif,

yang mendukung pengajaran dan penelitian. Kolaborasi antara universitas, lembaga penelitian, dan perpustakaan daerah menjadi kunci untuk merealisasikan agenda ini.

Kesembilan, dalam jangka pendek (12–18 bulan) disarankan dilakukan sejumlah langkah prioritas: tim verifikasi kecil yang terdiri atas arsiparis, sejarawan, dan perwakilan komunitas untuk menandai status verifikasi setiap profil; pengembangan modul muatan lokal pilot di beberapa sekolah terpilih; digitalisasi awal 300 item foto dan rekaman; serta pelaksanaan workshop terintegrasi bagi guru dan pengelola arsip. Rencana aksi ini harus disusun dalam bentuk rencana kerja terukur dengan indikator keberhasilan yang jelas, contohnya yaitu jumlah profil terverifikasi, jumlah sekolah pilot, dan jumlah item yang terdigitalisasi.

Akhirnya, pelestarian memori perjuangan di Sulawesi Tengah adalah proses etis dan politis yang melampaui kepentingan satu generasi; ia menuntut komitmen panjang, pengaturan tata kelola yang adil, dan keterlibatan langsung komunitas pemilik memori. Pendekatan yang saya rekomendasikan menempatkan komunitas sebagai subjek, bukan objek, pelestarian: masyarakat harus diberi ruang memimpin verifikasi, pemeliharaan, dan manfaat ekonomi dari warisan mereka. Dengan demikian, memori kolektif tidak sekadar menjadi bahan pameran, melainkan modal hidup yang mampu memperkaya pendidikan, memperkuat identitas lokal, dan mendorong pembangunan daerah yang berkeadilan.

Bab V Penutup

Menjaga Api Fajar di Bumi Tadulako

Sejarah bukan sekadar kumpulan nama dan peristiwa, melainkan medan makna yang membentuk kesadaran kolektif suatu masyarakat. Melalui penelusuran jejak 25 tokoh pejuang dalam buku ini, tampak jelas bahwa Sulawesi Tengah bukanlah wilayah pinggiran dalam narasi perjuangan bangsa, melainkan bagian integral dari pergulatan panjang menuju kemerdekaan Indonesia. Dari pesisir Palu dan Donggala, lembah-lembah Sigi, hingga wilayah Poso, Tolitoli, Banggai, dan Tojo Una-Una, perjuangan hadir dalam beragam bentuk: perlawanan bersenjata, resistensi sosial-ekonomi, dakwah transformatif, hingga diplomasi kebangsaan.

Bab I telah menunjukkan bahwa perlawanan di Sulawesi Tengah lahir dari interaksi kompleks antara struktur kekuasaan tradisional dan penetrasi kolonialisme. Geografi menjadi strategi, adat menjadi legitimasi, dan spiritualitas menjadi energi moral. Bab II kemudian memperlihatkan bahwa para pejuang tidak berdiri dalam ruang hampa; mereka berakar pada konteks lokal namun bergerak dalam arus sejarah nasional. Tokoh-tokoh seperti Tombolotutu, Pue Songgolangi, La Makagili, Guru Tua Sayyid Idrus bin Salim Al Jufri, Dato Karama, hingga Idjaza dan lainnya menunjukkan bahwa bentuk perjuangan tidak tunggal, ia adaptif terhadap zamannya.

Bab III menegaskan bahwa nilai kepahlawanan bukan sekadar retorika, melainkan perangkat etis dan strategis: integritas, keberanian, solidaritas lintas komunitas, kecerdasan membaca situasi, serta kemampuan mentransformasikan kearifan lokal menjadi kekuatan politik. Nilai-nilai tersebut terbukti mampu menjaga daya tahan masyarakat Sulawesi Tengah dalam menghadapi tekanan kolonial maupun dinamika awal kemerdekaan.

Sementara itu, Bab IV menggeser fokus dari memori ke kebijakan. Sejarah yang tidak dirawat akan kehilangan relevansi sosialnya. Oleh karena itu, pendidikan, digitalisasi arsip, perlindungan hukum situs sejarah, ekonomi budaya, serta agenda penelitian berkelanjutan menjadi bagian dari strategi pelestarian yang sistematis. Pelestarian bukan romantisme masa lalu, melainkan investasi identitas untuk masa depan.

Dalam kerangka historiografi nasional, buku ini mengajukan satu tesis penting: perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya berlangsung di pusat-pusat kekuasaan kolonial seperti Batavia, Surabaya, atau Yogyakarta, tetapi juga di wilayah-wilayah yang secara administratif dahulu dianggap perifer. Sulawesi Tengah adalah salah satu simpul penting dari jaringan perlawanan Nusantara. Mengabaikan kontribusinya berarti menyempitkan pemahaman kita tentang kebangsaan.

Lebih jauh, buku ini juga mengingatkan bahwa penulisan sejarah adalah proses yang terus berkembang. Verifikasi arsip, pelacakan dokumen kolonial, kajian lisan, dan penelitian interdisipliner tetap diperlukan untuk memperkaya dan menyempurnakan narasi yang ada. Sejarah bukan monumen yang beku, melainkan ruang dialog antara generasi.

Akhirnya, menjaga “fajar” di Bumi Tadulako berarti menjaga kesadaran bahwa kemerdekaan adalah hasil perjuangan kolektif lintas suku, agama, dan latar sosial. Fajar bukan hanya metafora awal hari, tetapi simbol harapan yang terus diperbarui oleh setiap generasi. Tugas generasi hari ini bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat integritas, ilmu pengetahuan, dan tanggung jawab sosial sebagai bentuk perjuangan baru.

Semoga buku ini menjadi pijakan awal bagi lahirnya penelitian yang lebih mendalam, kurikulum sejarah lokal yang lebih kuat, serta kebijakan publik yang berpijak pada identitas sejarah yang kokoh. Dengan demikian, memori para pejuang tidak berhenti sebagai potret di dinding atau nama di prasasti, melainkan hidup dalam tindakan, kebijakan, dan karakter masyarakat Sulawesi Tengah masa kini dan masa depan.

“Fajar itu telah terbit. Tugas kitalah menjaganya agar tidak pernah padam.”

A

Abdul Azis Larekeng Figur lokal yang berkontribusi dalam dinamika perjuangan politik di wilayahnya.

Abdul Wahid Toana Pemimpin yang terlibat dalam gerakan perlawanan terhadap penetrasi kolonial dan mempertahankan hak-hak komunitas.

Adat Sistem norma, aturan, dan praktik budaya yang berlaku dalam komunitas tertentu; mencakup upacara, hukum tidak tertulis, dan mekanisme penyelesaian konflik. Dalam konteks buku ini, adat berperan sebagai dasar legitimasi sosial dan sumber strategi mobilisasi.

Arsip Kumpulan dokumen tertulis, foto, peta, dan rekaman yang disimpan untuk tujuan bukti atau penelitian. Penggunaan arsip di buku ini merujuk pada arsip pemerintah daerah, koleksi keluarga, dan catatan administratif kolonial.

Asesmen formatif Penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan peserta didik dan memberi umpan balik, berbeda dengan asesmen sumatif yang menilai hasil akhir.

B

Boikot Tindakan kolektif menolak bertransaksi atau bekerja sebagai bentuk tekanan ekonomi-politik. Dalam konteks perlawanan lokal, boikot kerap dipakai untuk melemahkan pendapatan administratif kolonial atau pedagang yang kolaboratif.

Buku portofolio Kumpulan produk pembelajaran (LKS, foto, rekaman) yang dijadikan bukti capaian peserta didik; berguna untuk penilaian autentik dalam muatan lokal.

Cagar Budaya Objek, bangunan, atau situs yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan (mis. UU No.11/2010) karena nilai sejarah, budaya, atau arkeologisnya; pendaftaran memberikan jaminan perlindungan hukum.

Choral reading Metode membaca bersama (semua siswa membaca serempak) yang dipakai untuk melatih intonasi dan kelancaran bacaan pada anak awal belajar membaca.

Dato Karama Syekh Abdullah Raqie Tokoh penyebar Islam dan figur religius yang memiliki pengaruh kuat dalam pembentukan tatanan sosial serta legitimasi kepemimpinan lokal.

Datu Pamusu Pemimpin tradisional yang memiliki otoritas adat dan berperan dalam mempertahankan kedaulatan lokal.

Digitalisasi Proses mengonversi materi analog (foto, teks, rekaman) menjadi format digital agar mudah disimpan, dicari, dan diakses. Digitalisasi harus disertai metadata standar dan kebijakan etis.

Djaelangkara Figur lokal yang dikenang sebagai bagian dari jaringan perlawanan berbasis komunitas.

Dokumentasi lisan (oral history) Metode merekam kisah yang disampaikan langsung oleh narasumber (tetua, keturunan), termasuk wawancara terstruktur dan transkrip. Teknik ini krusial untuk mengisi kekosongan sumber tertulis.

E

Ekonomi budaya Kegiatan ekonomi yang dibangun atas dasar produk budaya (festival, wisata sejarah, kerajinan), dengan tujuan memberi manfaat ekonomi kepada komunitas sekaligus melestarikan warisan.

Ejaan baku / PUEBI Kaidah penulisan bahasa Indonesia baku (Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia / PUEBI). Naskah ini mengikuti PUEBI untuk konsistensi istilah dan nama.

F

Fieldwork (pembelajaran berbasis pengalaman) Kegiatan lapangan terstruktur (kunjungan situs, wawancara, peta memori) yang menggabungkan pembelajaran akademik dengan praktik langsung di komunitas.

Foto arsip Gambar historis yang menyimpan informasi ikonografis; setiap foto diinventaris harus dilengkapi metadata: tokoh, lokasi, perkiraan tahun, sumber koleksi, dan status verifikasi.

G

Gerilya Taktik perang tidak konvensional yang memanfaatkan hit-and-run, pengetahuan medan, dan dukungan komunitas. Dalam konteks lokal, gerilya sering didukung oleh jaringan adat dan sumber daya rumah tangga.

Gelar adat Keistimewaan nama atau jabatan dalam struktur tradisi (mis. raja, magau, kepala adat) yang memberi legitimasi sosial dan kapasitas mobilisasi.

Guru Tua Sayyid Idrus bin Salim Al Jufri Ulama dan pendidik yang berperan dalam membangun kesadaran keagamaan dan pendidikan masyarakat sebagai bagian dari perjuangan moral dan sosial di Sulawesi Tengah.

H

Hak narasumber (informed consent) Prinsip etis yang menyatakan bahwa narasumber harus diberi informasi lengkap terkait rekaman atau penggunaan data mereka, dan memberikan persetujuan yang sadar sebelum material dipublikasikan.

I

Idjaza Raja Palu pada masa transisi kolonial ke pendudukan Jepang dan awal kemerdekaan. Pada masa pemerintahannya, Souraja mengalami perubahan fungsi: dari pusat pemerintahan kerajaan, menjadi tangsi militer Jepang (1942–1945), lalu kembali sebagai pusat pemerintahan kerajaan pasca-1945.

Indeks / Index Daftar nama, tempat, atau istilah penting di akhir buku yang memudahkan pembaca mencari entri tertentu.

Informasi metadata Data yang menjelaskan isi suatu item digital (mis. nama tokoh, varian ejaan, lokasi, tahun, sumber, status verifikasi). Standarisasi metadata mempermudah pencarian dan interoperabilitas arsip digital.

J

Jam Pelajaran (JP) Satuan waktu pembelajaran di sekolah; biasanya SD/MI 1 JP = 35 menit, SMP/MTs: 1 JP = 40 menit, SMA/MA/SMK: 1 JP = 45 menit. Dalam silabus muatan lokal, modul dinyatakan berdasarkan JP.

Joto Daeng Pawindu Tokoh perempuan yang terlibat dalam perjuangan sosial dan dukungan logistik dalam masa perlawanan.

K

Karajalemba Figur lokal yang dikenal dalam sejarah resistensi terhadap kebijakan kolonial.

Karamah Konsep kewibawaan atau kharisma spiritual yang diyakini memancarkan otoritas moral; tokoh yang dianggap memiliki karamah sering menjadi pemersatu lintas kelompok saat konflik.

Kurikulum Merdeka Kebijakan kurikulum nasional yang memberi fleksibilitas kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan muatan lokal dan pendekatan pembelajaran kontekstual (diadopsi sebagai kebijakan nasional).

Kearifan lokal Pengetahuan praktik, nilai, dan teknologi yang berkembang dalam komunitas tertentu; dipakai sebagai strategi adaptif dalam perlawanan dan kelangsungan masyarakat.

L

La Makagili Figur perlawanan dari kawasan pesisir yang berperan dalam mobilisasi masyarakat terhadap kebijakan fiskal kolonial. Dikenal melalui narasi lisan sebagai penggerak solidaritas komunal.

La'Noni Tokoh perlawanan yang muncul dalam narasi komunitas sebagai simbol keberanian terhadap tekanan kolonial.

LKS (Lembar Kerja Siswa) Bahan aktivitas yang digunakan siswa untuk latihan dan sebagai bagian dari penilaian formatif dalam proses pembelajaran.

Legitimasi tradisional Kekuatan pengakuan sosial yang diperoleh seseorang atau institusi melalui praktik adat dan simbol budaya (mis. pengukuhan di istana).

M

Magau Istilah untuk pemimpin tradisional/raja kecil di beberapa komunitas Sulawesi; jabatan ini memiliki fungsi simbolik dan administratif dalam struktur lokal.

Magau Yojokodi Tomesiema Magau (raja lokal) yang memainkan peran dalam struktur politik tradisional dan dinamika hubungan dengan otoritas kolonial.

Malonda Tokoh yang terlibat dalam struktur kepemimpinan lokal dan memobilisasi komunitas dalam menghadapi tekanan kolonial, terutama dalam konteks pertahanan wilayah adat.

Mpolite Tokoh perlawanan yang terkait dengan pertahanan struktur adat dan otonomi lokal.

Metadata standar Kumpulan atribut yang harus ada pada setiap item digital (mis. judul, pembuat, tanggal, tempat, kondisi), sehingga arsip dapat dikelola secara sistematis.

Mokole Marunduh Pemimpin tradisional (mokole) dari wilayah Banggai yang berperan dalam mempertahankan kedaulatan adat terhadap tekanan kolonial.

Mokole Owolu Marunduh Pemimpin tradisional Banggai yang terlibat dalam negosiasi dan resistensi terhadap kebijakan kolonial.

N

Negosiasi publik / diplomasi lokal Strategi politik non-kekerasan di mana tokoh lokal berunding dengan otoritas kolonial atau pemerintahan untuk mempertahankan hak komunitas atau memperoleh konsesi.

O

Oral history Lihat: Dokumentasi lisan.

P

Perang Pajak Istilah deskriptif untuk serangkaian perlawanan terhadap kebijakan pemungutan pajak kolonial yang dianggap menekan ekonomi lokal; contoh penting tercatat di wilayah Tolitoli.

Pue Lasadindi Tokoh adat yang berperan dalam mengorganisir perlawanan berbasis komunitas dan struktur kekerabatan.

Pue Songgolangi Tokoh perlawanan dari wilayah pedalaman Sulawesi Tengah yang dikenal sebagai pemimpin berbasis adat. Perjuangannya terkait penolakan terhadap intervensi kolonial atas tata kelola tanah dan kewenangan adat. Aktif pada Era Perlawanan Kolonial.

Pusat Dokumentasi / Repositori Lembaga (fisik atau digital) yang menyimpan koleksi arsip dan memberi akses publik atau terbatas sesuai kebijakan.

Portofolio siswa Kumpulan produk pembelajaran siswa yang dipakai untuk penilaian berkelanjutan; berisi LKS, foto kegiatan, rekaman presentasi, dan catatan reflektif.

R

Ratu Ranginngamagi Tokoh perempuan dalam sejarah lokal yang memegang peran dalam struktur kepemimpinan tradisional dan dinamika politik wilayahnya.

RPP / RPP+ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran; RPP+ adalah versi RPP yang lebih komprehensif dan fleksibel sesuai pedoman Kurikulum Merdeka, mencakup capaian pembelajaran, kegiatan, dan instrumen penilaian.

Residen (administratif kolonial) Pejabat pemerintahan kolonial yang bertugas mengawasi wilayah administratif; dokumen residen sering menjadi sumber arsip penting.

S

Souraja (Souraja / Souraja Palu) Istana atau pusat kebudayaan tradisional dalam konteks Kerajaan Palu; situs-situs seperti ini penting untuk identitas komunitas dan sering menjadi objek pelestarian.

Standarisasi Proses menetapkan ukuran, format, atau tata cara baku; di konteks arsip, standarisasi metadata dan prosedur verifikasi diperlukan untuk kualitas dokumentasi.

Sourcing / Triangulasi sumber Praktik verifikasi yang mencocokkan minimal tiga jenis sumber (mis. foto, dokumen administrasi, kesaksian lisan) untuk memastikan kebenaran suatu klaim sejarah.

Syukuran Aminuddin Amir Tokoh yang berperan dalam fase transisi menuju kemerdekaan dan konsolidasi dukungan terhadap Republik Indonesia.

T

Talasa Figur lokal yang muncul dalam narasi resistensi berbasis komunitas terhadap intervensi kolonial.

Tandjumbulu Tokoh dalam sejarah perlawanan kolonial yang terkait dengan mobilisasi wilayah tertentu di Sulawesi Tengah.

Tombolotutu Pemimpin perlawanan dari wilayah Parigi Moutong yang menentang penetrasi kolonial dalam sistem perdagangan dan administrasi lokal. Diingat sebagai simbol resistensi terbuka terhadap dominasi asing.

Towua Langi Pejuang dari wilayah pedalaman yang dikenal melalui tradisi lisan sebagai pemimpin taktis dalam konflik berbasis medan pegunungan.

Triangulasi Lihat: Sourcing / Triangulasi sumber.

U

Umar Papeo Pejuang yang dikenal dalam konteks perlawanan terhadap kebijakan kolonial di wilayahnya, berperan dalam mobilisasi ekonomi dan sosial.

UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur perlindungan objek dan situs cagar budaya di Indonesia, termasuk prosedur pendaftaran dan sanksi untuk perusakan.

UNESCO

UNESCO

Organisasi PBB yang memberikan pedoman internasional tentang pelestarian warisan budaya dan partisipasi komunitas.

Unit digitalisasi arsip Tim atau unit kerja yang bertanggung jawab menyiapkan, memindai, memberi metadata, dan menyimpan koleksi digital secara terstandar.

V

Varian ejaan Bentuk alternatif penulisan nama atau istilah yang muncul di sumber berbeda; glosarium menekankan pentingnya mendokumentasikan varian agar riset tidak kehilangan jejak bukti.

W

Wawancara terstruktur Metode pengumpulan data lisan dengan daftar pertanyaan baku yang sama untuk setiap narasumber, memudahkan perbandingan dan transkripsi.

Warisan takbenda (intangible heritage) Praktik, ekspresi, pengetahuan, dan keterampilan yang diwariskan antar generasi; misalnya lagu, ritual, teknik bertahan hidup—semua relevan dalam studi perjuangan lokal.

Y

Yuridiksi / Yurisdiksi Kewenangan hukum atau administratif atas wilayah tertentu; konflik yurisdiksi antara kekuasaan tradisional dan kolonial kerap menjadi akar konflik.

Daftar Pustaka

Fahru, L. Islami [@fahru_l_islami]. (2024, Maret 1). *Pue Songgolangi* [Video]. TikTok. https://www.tiktok.com/@fahru_l_islami/

Fahru, L. Islami [@fahru_l_islami]. (2024, Maret 2). *La Makagili (Pue Nggeu/Toma)* [Video]. TikTok. https://www.tiktok.com/@fahru_l_islami/

Fahru, L. Islami [@fahru_l_islami]. (2024, Maret 3). *Tombolotutu* [Video]. TikTok. https://www.tiktok.com/@fahru_l_islami/

Fahru, L. Islami [@fahru_l_islami]. (2024, Maret 4). *Malonda (Lamalonda/Aru Bale)* [Video]. TikTok. https://www.tiktok.com/@fahru_l_islami/

Fahru, L. Islami [@fahru_l_islami]. (2024, Maret 5). *Pue Lasadindi (Mangge Rante)* [Video]. TikTok. https://www.tiktok.com/@fahru_l_islami/

Fahru, L. Islami [@fahru_l_islami]. (2024, Maret 6). *Dato Karama (Syech Abdullah Ra'qie)* [Video]. TikTok. https://www.tiktok.com/@fahru_l_islami/

Fahru, L. Islami [@fahru_l_islami]. (2024, Maret 7). *Guru Tua (Syaiikh Idrus bin Salim Al-Jufri)* [Video]. TikTok. https://www.tiktok.com/@fahru_l_islami/

Fahru, L. Islami [@fahru_l_islami]. (2024, Maret 8). *Umar Papeo* [Video]. TikTok. https://www.tiktok.com/@fahru_l_islami/

Fahru, L. Islami [@fahru_l_islami]. (2024, Maret 9). *Talasa (Nduwa)* [Video]. TikTok. https://www.tiktok.com/@fahru_l_islami/

Fahru, L. Islami [@fahru_l_islami]. (2024, Maret 10). *Abdul Wahid Toana* [Video]. TikTok. https://www.tiktok.com/@fahru_l_islami/

Fahru, L. Islami [@fahru_l_islami]. (2024, Maret 11). *Mpolite (Inana Moso)* [Video]. TikTok. https://www.tiktok.com/@fahru_l_islami/

Fahru, L. Islami [@fahru_l_islami]. (2024, Maret 12). *Ratu Ranginngamagi* [Video]. TikTok. https://www.tiktok.com/@fahru_l_islami/

Fahru, L. Islami [@fahru_l_islami]. (2024, Maret 13). *Mokole Marunduh (Datu ri Tana)* [Video]. TikTok. https://www.tiktok.com/@fahru_l_islami/

Fahru, L. Islami [@fahru_l_islami]. (2024, Maret 14). *Mokole Owolu Marunduh* [Video]. TikTok. https://www.tiktok.com/@fahru_l_islami/

Fahru, L. Islami [@fahru_l_islami]. (2024, Maret 15). *Magau Yojokodi Tomesiema* [Video]. TikTok. https://www.tiktok.com/@fahru_l_islami/

Fahru, L. Islami [@fahru_l_islami]. (2024, Maret 16). *Hj. Joto Daeng Pawindu* [Video]. TikTok. https://www.tiktok.com/@fahru_l_islami/

Fahru, L. Islami [@fahru_l_islami]. (2024, Maret 17). *Djaelangkara (Mangge Dompou)* [Video]. TikTok. https://www.tiktok.com/@fahru_l_islami/

Fahru, L. Islami [@fahru_l_islami]. (2024, Maret 18). *Tandjumbulu* [Video]. TikTok. https://www.tiktok.com/@fahru_l_islami/

Fahru, L. Islami [@fahru_l_islami]. (2024, Maret 19). *Syukuran Aminuddin Amir* [Video]. TikTok. https://www.tiktok.com/@fahru_l_islami/

Fahru, L. Islami [@fahru_l_islami]. (2024, Maret 20). *Abdul Azis Larekeng* [Video]. TikTok. https://www.tiktok.com/@fahru_l_islami/

Fahru, L. Islami [@fahru_l_islami]. (2024, Maret 21). *La'Noni* [Video]. TikTok. https://www.tiktok.com/@fahru_l_islami/

Fahru, L. Islami [@fahru_l_islami]. (2024, Maret 22). *Datu Pamusu (Magau Dolo)* [Video]. TikTok. https://www.tiktok.com/@fahru_l_islami/

Fahru, L. Islami [@fahru_l_islami]. (2024, Maret 23). *Karajalemba (Toi Domp)* [Video]. TikTok. https://www.tiktok.com/@fahru_l_islami/

Fahru, L. Islami [@fahru_l_islami]. (2024, Maret 24). *Idjaza* [Video]. TikTok. https://www.tiktok.com/@fahru_l_islami/

Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah. (1979). *Sejarah daerah Sulawesi Tengah*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. (2021, Juli). *Sejarah Sulawesi Tengah*. Website Resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. <https://sultengprov.go.id/wp-content/uploads/2021/07/SEJARAH-SULTENG.pdf>

Arsip Sulteng. (2021, Juli). *Sejarah Provinsi Sulawesi Tengah*. ArsipSulteng. <https://arsipsulteng.com/arsip/5/sejarah-provinsi-sulawesi-tengah>